

Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528 | P-ISSN: 2986-9439

Website <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

Open Access under CC BY NC SA
Copyright © 2026, Elina Susanti, et.al

Vol. 4, No. 2, 2026, 1017-1028
DOI: <https://doi.org/10.61930/pjpi.v4i2>

Penerapan Sistem Penatausahaan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Sektor Pendidikan

Elina Susanti¹, Nur Baety Habibah Jannah²

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga

Email: 23204092041@student.uin-suka.ac.id , baetyhabibah@gmail.com

Abstract:

Improving financial accountability in the education sector is a strategic step toward achieving transparency and efficiency in the use of increasingly significant funds each year. This article discusses the implementation of financial administration systems as an effort to support accountable financial management, focusing on budgeting, execution, recording, reporting, and financial supervision in educational institutions. The application of information technology, such as digital accounting systems, has become a crucial element in enhancing efficiency and accuracy in recording financial transactions while facilitating audit and evaluation processes. This study adopts a literature review approach to identify various practices and concepts related to financial administration that can improve the accountability of educational institutions. The analysis results indicate that an integrated financial administration system not only supports transparency and accountability but also minimizes the risk of fund misuse, enhances budget allocation efficiency, and strengthens public trust. Therefore, the implementation of an effective financial administration system is expected to promote sustainable financial management in education and positively impact the quality of education.

Keywords: Financial Accountability, Financial Administration, Transparency, Supervision, Education

Abstrak:

Peningkatan akuntabilitas keuangan di sektor pendidikan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi penggunaan dana yang semakin signifikan setiap tahunnya. Penulis ini membahas penerapan sistem penatausahaan sebagai upaya mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel, dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan di lembaga pendidikan. Penerapan teknologi informasi, seperti sistem akuntansi berbasis digital, menjadi elemen penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi keuangan, sekaligus mempermudah proses audit dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi berbagai praktik dan konsep terkait penatausahaan keuangan yang dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem penatausahaan yang terintegrasi tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas tetapi juga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, implementasi sistem penatausahaan yang efektif diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kualitas pendidikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan, Penatausahaan, Transparansi, Pengawasan, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas keuangan dalam sektor pendidikan merupakan aspek krusial untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana pendidikan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Akuntabilitas keuangan yang baik akan membantu lembaga pendidikan mempertahankan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan untuk mencapai akuntabilitas tersebut adalah penerapan sistem penatausahaan yang tertib dan terstruktur. Sistem penatausahaan yang baik dapat membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penelitian terbaru, penerapan sistem penatausahaan yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan pengelolaan anggaran di sektor pendidikan, terutama dalam hal pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Yusuf & Sari, 2021). Selain itu, sistem yang baik juga membantu mengurangi kesalahan administrasi dan memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan benar dan dapat diaudit (Rahayu & Purnomo, 2020). Penerapan sistem penatausahaan yang baik dapat mencakup penggunaan teknologi informasi seperti software akuntansi, yang memungkinkan aksesibilitas dan efisiensi lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan (Saputra et al., 2019).

Sistem penatausahaan keuangan yang efektif tidak hanya mendukung tercapainya akuntabilitas tetapi juga memberikan kerangka yang kuat untuk perencanaan keuangan yang berkelanjutan. Misalnya, penelitian oleh Lestari dan Rahman (2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem penatausahaan yang baik dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengalokasikan anggaran secara tepat, sehingga memberikan dampak positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Dengan demikian, penting bagi institusi pendidikan untuk mengadopsi dan menerapkan sistem penatausahaan yang komprehensif sebagai upaya mendukung pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode library research atau studi kepustakaan untuk menelusuri dan menganalisis literatur terkait penerapan sistem penatausahaan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan di sektor pendidikan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan yang relevan tanpa melakukan observasi langsung ke lapangan. Studi kepustakaan dipilih karena metode ini efektif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik penatausahaan keuangan yang telah diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan, serta dampaknya terhadap akuntabilitas lembaga pendidikan.

Pendekatan library research ini memberikan peneliti kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai aspek penting terkait penerapan sistem penatausahaan yang mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan di sektor pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai pentingnya penerapan sistem penatausahaan yang terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan.

PEMBAHASAN

Penatausahaan Keuangan Pendidikan

Penatausahaan keuangan pendidikan adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dana yang bertujuan untuk memastikan setiap transaksi keuangan di lembaga pendidikan tercatat dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini tidak hanya mencakup pencatatan transaksi, tetapi juga meliputi pengawasan, pelaporan, dan perencanaan anggaran untuk mencapai penggunaan dana yang efektif dan efisien. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam penatausahaan keuangan pendidikan:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Dalam siklus penatausahaan keuangan pendidikan, tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Pada tahap ini, lembaga pendidikan membuat anggaran tahunan berdasarkan kebutuhan operasional dan pengembangan. Perencanaan dan penganggaran adalah tahap pertama dalam siklus penatausahaan

keuangan pendidikan. Pada tahap ini, lembaga pendidikan menyusun anggaran tahunan untuk mendukung program pendidikan, fasilitas, pelatihan guru, bahan ajar, dan kebutuhan lain yang menunjang proses pembelajaran. Dengan perencanaan anggaran yang baik, lembaga pendidikan dapat memprioritaskan alokasi dana pada program yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Anggaran ini dimaksudkan untuk mendukung program pendidikan, fasilitas, pelatihan guru, bahan ajar, dan kebutuhan lain yang menunjang pembelajaran. Dengan perencanaan anggaran yang baik, lembaga pendidikan dapat memprioritaskan alokasi dana pada program yang memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.

2. Pelaksanaan Anggaran

Anggaran harus dilaksanakan setelah disusun dan disetujui. Pada titik ini, dana yang dianggarkan digunakan sesuai dengan rencana dan peruntukannya. Misalnya, dana harus dialokasikan untuk membangun fasilitas sekolah, membeli alat tulis, dan program pelatihan. Pada tahap ini, pengelolaan yang baik mencegah pemborosan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana. Selain itu, pelaksanaan anggaran memerlukan kontrol ketat untuk memastikan bahwa pengeluaran semuanya transparan dan relevan dengan pendidikan.

3. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Penatausahaan keuangan sangat bergantung pada pencatatan yang akurat. Semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat secara menyeluruh dengan menggunakan metode akuntansi yang berlaku. Tanggal, jumlah, dan deskripsi transaksi, serta sumber atau penerima dana, semua termasuk dalam catatan ini. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan data ini harus disajikan secara teratur dan menjelaskan dengan tepat keadaan keuangan organisasi. Lembaga pendidikan dapat memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana mereka kepada pemerintah, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal.

4. Pengawasan dan Audit

Pengawasan dan audit adalah aspek penting dalam penatausahaan keuangan pendidikan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal lembaga, misalnya oleh manajemen atau komite pengawas sekolah, untuk mengamati

secara berkala apakah anggaran digunakan sesuai tujuan. Audit, yang bisa dilakukan oleh auditor internal atau pihak eksternal, bertujuan untuk meninjau dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prosedur keuangan. Hasil audit ini membantu menemukan potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana sehingga lembaga dapat segera melakukan perbaikan dan tindakan preventif.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Di era digital, banyak lembaga pendidikan mulai mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah proses penatausahaan keuangan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi memungkinkan pengelolaan dan pelaporan keuangan menjadi lebih efisien, akurat, dan cepat. Sistem digital juga mempermudah akses data keuangan, pelacakan transaksi, serta penyajian laporan yang lebih terstruktur. Dengan teknologi, lembaga pendidikan dapat memantau kondisi keuangan secara real-time dan mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian anggaran lebih awal.

Manfaat penatausahaan keuangan dalam pendidikan

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Penatausahaan keuangan yang baik memungkinkan setiap transaksi keuangan tercatat dengan detail dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam memantau pengeluaran dan pemasukan. Dengan transparansi yang meningkat, pemangku kepentingan, termasuk orang tua, yayasan, dan pemerintah, dapat memahami bagaimana dana digunakan, meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga pendidikan.

2. Memudahkan perencanaan anggaran

Sistem penatausahaan keuangan yang terstruktur membantu sekolah dalam merencanakan anggaran dengan lebih tepat. Dengan memiliki catatan yang jelas atas pengeluaran dan pemasukan sebelumnya, sekolah dapat membuat proyeksi yang lebih akurat untuk anggaran mendatang. Ini juga membantu menentukan prioritas dalam alokasi dana sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan pendidikan.

3. Meminimalkan resiko penyalahgunaan dana

Dengan pencatatan yang rapi dan pengawasan yang baik, penatausahaan keuangan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan sesuai peruntukannya. Ini sangat penting untuk menghindari

tindakan korupsi atau ketidakcocokan penggunaan dana yang dapat merugikan institusi pendidikan.

4. Mendukung proses evaluasi keuangan

Penatausahaan keuangan yang baik memberikan data yang lengkap dan akurat, yang memudahkan proses evaluasi. Sekolah dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran untuk berbagai kegiatan atau program dan mengevaluasi pencapaian dari setiap dana yang telah dikeluarkan. Evaluasi ini menjadi bahan perbaikan untuk penggunaan anggaran di masa mendatang.

5. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana

Melalui penatausahaan keuangan yang efisien, sekolah dapat memastikan bahwa setiap dana digunakan secara optimal dan tidak terjadi pemborosan. Efisiensi ini memungkinkan sekolah mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan utama, seperti pengembangan kurikulum, perbaikan fasilitas, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas merupakan wujud keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) buat menjamin kalau tugas serta kewajiban yang diembannya telah dilaksanakan cocok syarat yang berlaku. Secara universal, akuntansi merupakan sesuatu sistem buat menciptakan data keuangan yang digunakan oleh para penggunanya buat mengambil keputusan bisnis. Tujuannya buat mencatat, memberi tahu, menginterpretasikan informasi keuangan buat digunakan dalam pengambilan keputusan (Harmain et.al., 2019). Akuntabilitas ialah ketentuan bawah buat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan buat membenarkan bahwasanya kekuasaan ditunjukan buat menggapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, energi guna, kejujuran dan kebijaksanaan sangat tinggi. (Batubara, 2022)

Akuntabilitas (accountability) yakni konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara murah dan efisien tanpa dibebani kewajiban buat berikan ketahui, kebalikannya accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Terwujudnya akuntabilitas yakni tujuan utama dari reformasi zona publik. Tuntutan

akuntabilitas publik mengharuskan lembaga- lembaga zona publik buat lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) ialah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih besar bukan hanya pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) ialah pertanggungjawaban kepada warga luas. Tuntutan yang sehabis itu mencuat ialah kebutuhan akan laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga zona public (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas yakni bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan buat apa organisasi bertanggung jawab. Bersumber pada sebagian pendapat tersebut, dapat disimpulkan jika akuntabilitas merujuk pada kewajiban masing-masing orang maupun kelompok dalam suatu institusi buat memenuhi tanggung jawab yang jadi amanahnya, yakni menjamin terwujudnya nilai- nilai publik. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari gimana pengelola bertanggungjawab dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Pengelola dituntut buat melakukan pencatatan keuangan secara akuntabel dengan mempraktikkan akuntansi organisasi nirlaba. Akuntan nirlaba adalah akuntan yang ahli dalam mencatat dan melaporkan permasalahan instansi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya, termasuk masjid yang merupakan lembaga keagamaan. bMengenai ini bertujuan biar pengelola dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya, tingkatkan efesiensi dan energi guna kinerja dan dapat menjauhi penyalahgunaan kekuasaan. Melakukan pencatatan secara akuntabel pula dibutuhkan buat mempertahankan kepercayaan jama' ah kepada pengelola keuangan (Rahma et al.,2023).

Transparansi

Transparansi adalah konsep yang berfokus pada keterbukaan informasi serta aksesibilitas data dan proses dalam sebuah institusi, baik itu pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi lainnya. Transparansi mengharuskan setiap tindakan atau keputusan yang diambil dapat dijelaskan, dimengerti, dan diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti masyarakat umum, pemegang saham, atau pemangku kepentingan lainnya.

Unsur-unsur Transparansi

1. Keterbukaan informasi: Transparansi memastikan bahwa informasi tersedia

dan dapat diakses dengan mudah. Informasi yang diberikan harus relevan dan lengkap, sehingga tidak ada upaya untuk menutupi atau memanipulasi data.

2. Akurasi dan keandalan: Transparansi menuntut bahwa informasi yang disajikan akurat, benar, dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menerima informasi dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang valid.
3. Keterjangkauan dan Aksesibilitas: Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh publik atau pihak yang berkepentingan. Ini termasuk membuat data atau laporan dalam format yang mudah dipahami dan dalam bahasa yang jelas.
4. Partisipasi: Transparansi sering dikaitkan dengan kesempatan bagi pihak terkait untuk berpartisipasi atau memberikan masukan. Keterlibatan ini dapat berupa forum publik, konsultasi, atau survei, yang memungkinkan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka.

Contoh transparansi pada keuangan Perusahaan atau pemerintah mengeluarkan laporan keuangan rutin yang dapat diakses publik. Laporan ini mencakup pendapatan, pengeluaran, dan alokasi anggaran.

Hubungan transparansi dan proses akuntabilitas

1. Audit dan Pengawasan: Transparansi memudahkan pengawasan dan audit karena informasi tersedia untuk evaluasi pihak ketiga, baik lembaga auditor, komite internal, atau masyarakat umum. Laporan yang terbuka juga memungkinkan untuk menilai apakah prosedur dan anggaran dijalankan sesuai dengan peraturan.
2. Evaluasi Kinerja: Transparansi memungkinkan pengukuran kinerja terhadap target atau standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan yang jelas dan terperinci, pemangku kepentingan dapat melihat apakah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau masih ada penyimpangan yang perlu diperbaiki.
3. Tanggung Jawab Publik: Dalam pemerintahan, transparansi meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan publik akses untuk melihat penggunaan anggaran atau implementasi kebijakan. Pemerintah yang transparan, misalnya, memungkinkan warga untuk memantau aliran anggaran atau efektivitas

program.

Manfaat Transparansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas

1. Meningkatkan Kepercayaan: Ketika organisasi atau pemerintahan bertindak secara transparan, kepercayaan publik cenderung meningkat, karena setiap tindakan dan keputusan dapat dinilai secara terbuka.
2. Meminimalkan Penyalahgunaan Wewenang: Transparansi mempersulit terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan karena adanya pengawasan dari pihak luar.
3. Memudahkan Pemulihan dan Koreksi: Jika ada kesalahan atau penyimpangan, transparansi memungkinkan organisasi segera mengakui dan memperbaikinya karena data dan fakta terbuka untuk umum.

Pengawasan Keuangan Pendidikan

Pengawasan keuangan pendidikan merupakan aspek krusial dalam upaya memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dikelola dengan baik dan digunakan secara efektif. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran pendidikan, serta untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam praktiknya, pengawasan keuangan pendidikan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, auditor, dan masyarakat. Pengawasan dapat dibedakan menjadi dua jenis: internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit atau lembaga di dalam organisasi pendidikan, seperti kepala sekolah atau tim manajemen, yang bertanggung jawab untuk memantau penggunaan anggaran. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor eksternal, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan lembaga pendidikan.

Aspek-aspek yang diawasi dalam pengawasan keuangan pendidikan mencakup penggunaan anggaran, pelaporan keuangan, dan kinerja program. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukan, baik untuk operasional, pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan pendidikan lainnya. Selain itu, lembaga pendidikan juga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala yang

mencerminkan kondisi keuangan dan penggunaan anggaran secara transparan.

Namun, pengawasan keuangan pendidikan tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dari beberapa lembaga pendidikan, yang dapat menghambat proses pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis dalam pengawasan juga bisa mengurangi efektivitas pengawasan. Di sisi lain, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan dapat menyebabkan rendahnya akuntabilitas lembaga pendidikan.

Dengan perkembangan teknologi, terdapat peluang untuk meningkatkan pengawasan keuangan pendidikan. Sistem informasi keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan pelaporan elektronik juga memudahkan akses dan pemantauan oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, platform partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dapat memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan kepada publik.

Secara keseluruhan, pengawasan keuangan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan pengawasan ini dapat berjalan dengan baik, mendorong akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Peningkatan akuntabilitas keuangan dalam sektor pendidikan sangat penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana. Penerapan sistem penatausahaan yang terstruktur dan efektif berperan kunci dalam mencapai tujuan ini dengan mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan pengelolaan anggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan, yang membantu mengidentifikasi pentingnya penatausahaan keuangan yang baik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penatausahaan keuangan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas pengelolaan dana. Akuntabilitas dan transparansi saling terkait, di

mana transparansi meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja, serta mendorong kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengawasan keuangan yang efektif di lembaga pendidikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, T. N., & Rahmawati, M. I. (2024). Pengaruh Sistem. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 13(2).
- Asriati, N., & Wulaningsih, R. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia, 4(4).
- Ayu, D. M., Gerindratta, R., Nurfadillah, N., Fariz, F., & Al Mashur, M. (2024). Strategi Pengelolaan Keuangan Sekolah untuk Meningkatkan Efisiensi Sumber Daya. Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(4).
- Handayani, A. P., Tussadiah, S. S., Tatsbita, A. I., & Larasati, F. D. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Instansi Pendidikan (SDM Babelan Kota 06). Jurnal Akuntan Publik, 2(2), 191-199.
- Harmain. (2019). Dasar-Dasar Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik.
- Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas Publik dan Peran Laporan Keuangan dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah.
- Nazarudin, Setyaningsih, K., & Kesumah, M. N. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Pembiayaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Madrasah Aliyah Paradigma Palembang. ADAARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10(2).
- Oktavia, W. T., & Aliyah, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. Among Makarti Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2).
- Rahayu, & Purnomo. (2020). Pengaruh Sistem, Penatausahaan dalam Menunjang Transparansi Pengelolaan Keuangan Pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan, 17(3).
- Saputra. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Penatausahaan Keuangan di Sektor Pendidikan.
- Shobri, M. (2024). Peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Pendidikan Islam. AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(2).
- Widodo, T., Muhammad, I., Dermayanti, R., Nursaid, & Amany, D. A. (2023). Manajemen Keuangan Pendidikan Berbasis Digital: Sebuah Kajian Pustaka. Indonesian Journal of Educational Management and Leadership, 1(2), 146-167.
- Yusuf, & Sari. (2021). Penerapan Sistem Penatausahaan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Sektor Pendidikan.

1028 | Analisis Pengembangan Media Ajar Inovatif Berbasis Artificial Intelligence : Dampaknya terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa

Anisa Solehah Nurwendah, Kiki Zakiah Khairany, Najma Nafisatul Ma'arifah